

The Influence of Regional Financial Independence Ratio, Pad Efficiency Ratio, and Pad Effectiveness Ratio on Regional Income of Bandung City

Nasirwan¹, Azzahra Yuni Puspita², Darryl Galed Suranta Tarigan³, Fajar Setiawan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: azzahrapuspita66@gmail.com; darryltarigan.td@gmail.com; fajrsett2002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio efektivitas PAD terhadap pendapatan daerah Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio efektivitas PAD, sedangkan variabel dependen adalah pendapatan daerah Kota Bandung. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisiensi PAD, dan rasio efektivitas PAD berpengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah Kota Bandung baik secara parsial maupun simultan. Pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara rasio-rasio ini dan pendapatan daerah dapat memberikan pandangan yang lebih baik dalam merancang kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan pengelolaan keuangan yang efektif, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. **Keyword: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah; Rasio Efektivitas PAD; Rasio Efisiensi PAD; Pendapatan Asli Daerah**

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of independence ratio, PAD efficiency ratio, and PAD effectiveness ratio on total revenue of Bandung. The independent variables used are the ratio of regional financial independence, the efficiency ratio of PAD, and the effectiveness ratio of PAD, while the dependent variable is the total revenue of Bandung City. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results showed that the independence ratio, PAD efficiency ratio, and PAD effectiveness ratio had a significant effect on the total revenue of Bandung City both partially and simultaneously. A comprehensive understanding of the relationship between these ratios and local revenue can provide a better view in designing regional and autonomous economic development policies and effective financial management, in order to improve public welfare and sustainable economic growth.

Keyword: Regional Financial Independence Ratio; PAD Effectiveness Ratio; PAD Efficiency Ratio; Regional Original Revenue

Corresponding Author:

Darryl Galed Suranta Tarigan,
Universitas Negeri Medan,
Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221, Indonesia
Email: darryltarigan.td@gmail.com



1. INTRODUCTION

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan dua undang-undang yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 diharapkan Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Perubahan sistem pemerintahan juga membawa perubahan pada sistem hubungan keuangan dalam pelaksanaan otonomi daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004. Reformasi sektor publik baru-baru ini yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, kesetaraan antargenerasi, kemampuan manajemen, efisiensi, dan efektivitas telah menghasilkan sistem keuangan publik

yang lebih terdesentralisasi, disertai dengan pengurangan transfer dari pemerintah pusat (Pollitt & Bouckaert, 2017).

Kemampuan pemerintah dalam hal seberapa efisien mereka dapat memenuhi semua jenis kewajiban keuangan (kewajiban jangka pendek dan jangka panjang) dan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program dan layanan tingkat dasar seperti yang disyaratkan oleh undang-undang (McDonald, 2018). Pemerintah daerah hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara demokratis, adil dan berkelanjutan (Nasirwan, 2024). Pemerintah daerah memainkan peran penting dengan memberikan layanan kepada warganya, misalnya, mereka terlibat dalam berbagai program pembangunan, bekerja untuk mengurangi kemiskinan (Lobao & Kraybill, 2009). Tanpa kondisi keuangan pemerintah daerah yang sehat, kualitas pelayanan publik akan menurun di masa depan (Huang & Ho, 2013). Pengelolaan keuangan daerah adalah bagian penting dari pemerintah daerah yang harus diperhatikan dengan cermat. Untuk menilai akuntabilitas suatu organisasi, pengukuran kinerja sangat penting. Ini lebih penting daripada hanya mengatakan bahwa dana publik telah digunakan dengan baik (Rahman, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung memiliki rasio kemandirian dalam pola konsultatif rata-rata 26,8% atau rendah; desentralisasi fiskal rata-rata 18,8% atau rendah; PAD rata-rata 109,5% atau sangat efektif; pajak daerah rata-rata 113,73% atau sangat efektif; dan retribusi daerah rata-rata 89,6% atau kurang efektif (Ulfa & Yuliafitri, 2023).

Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 8 menyebutkan terkait APBD yang disusun dengan menerapkan pendekatan kinerja, pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar pencapaian output maksimal diutamakan, hal yang harus dikedepankan adalah melakukan pendekatan kinerja melalui perencanaan dan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam menganalisis suatu laporan keuangan bisa menggunakan metode-metode dan salah satunya yang paling banyak digunakan adalah analisis rasio keuangan (Ulfa & Yuliafitri, 2023). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan melalui APBD yang telah diterbitkan dan dilaksanakan (Halim & Kusufi, 2007). Setiap tahun, analisis kinerja keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengetahui kecenderungan dalam pemerintahan Kota Bandung.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai permasalahan tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul "Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efisiensi PAD, dan Rasio Efektivitas PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Bandung".

2. LITERATURE REVIEW

A. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 18 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan. Hal ini menegaskan bahwa PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Daerah yang diperoleh melalui pemungutan yang diatur dalam Peraturan Daerah serta disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam undang - undang yang berlaku. Sementara (Andirfa, 2018) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu bagian dari sumber pendapatan daerah, yaitu segenap penerimaan yang masuk melalui kas daerah berdasarkan Undang -Undang dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

B. *Rasio Kemandirian Keuangan Daerah*

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan pemerintah daerah dalam rangka membiayai pembangunan, pelayanan kepada masyarakat, dan urusan pemerintahan lainnya (Siswanto & Maylani, 2022). Dengan kata lain, rasio kemandirian keuangan daerah membantu dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menghasilkan dan mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat atau pihak lainnya. (Halim, 2012) dalam (Siswanto & Maylani, 2022) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah berarti semakin tinggi pula kemandirian keuangan daerah.

C. *Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Rasio Efisiensi PAD menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Patarai, 2022). Dengan kata lain, Rasio Efisiensi PAD membantu dalam mengevaluasi sejauh mana biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan berbanding lurus dengan jumlah pendapatan yang berhasil dihasilkan, yang mencerminkan tingkat efisiensi dari kebijakan dan proses pengelolaan PAD oleh pemerintah daerah. Rasio Efisiensi PAD perlu dihitung untuk mengukur besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh realisasi pendapatan (Siswanto & Maylani, 2022). (Mahmudi, 2016) dalam

(Siswanto & Maylani, 2022) menjelaskan bahwa Rasio Efisiensi PAD dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi PAD.

D. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Patarai, 2022). Dengan kata lain, Rasio Efektivitas PAD membantu dalam mengevaluasi sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya daerah untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Rasio Efektivitas PAD dimaksudkan untuk membahas seberapa besar efektivitas dari kegiatan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah (Siswanto & Maylani, 2022).

3. RESEARCH METHOD

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung melalui situs resmi Portal APBD Daerah Kota Bandung. Waktu penelitian ini dimulai pada Bulan Maret 2024 sampai selesai.

B. Populasi Penelitian

Populasi Penelitian ialah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek ataupun subyek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti setelah itu menarik kesimpulan atau hasil pembahasan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah seluruh Pemerintah Daerah Kota Bandung.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian menarik kesimpulan dari variabel-variabel tersebut. (Pasaribu, Herawati, Utomo, & Aji, 2022). Variabel penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen).

1) Variabel Terikat (Dependen)

Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau akibat adanya perubahan dari variabel bebas (independen). (Pasaribu, Herawati, Utomo, & Aji, 2022). Variabel terikat (dependen) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Daerah (Y)

2) Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas (independen) merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari variabel terikat (dependen). (Pasaribu, Herawati, Utomo, & Aji, 2022). Variabel bebas (dependen) dalam penelitian ini adalah Rasio Kemandirian Daerah (X1), Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X2), Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X3).

D. Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan melakukan perumusan dan pengukuran terhadap variabel-variabel tersebut.

1) Rasio Kemandirian Daerah

Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017). Skala tinggi dan rendahnya rasio kemandirian daerah menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membantu merealisasikan APBD dari masing-masing daerah.

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{PAD}}{(\text{Bantuan Pusat, Provinsi dan Pinjaman})} \times 100\% \quad (1)$$

2) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat digunakan dalam menilai ukuran pemerintah daerah untuk melaksanakan pencapaian PAD sesuai anggaran yang sudah ditetapkan dan kemudian membandingkannya dengan target yang ditetapkan (Puspita Geatri Br Perangin-Angin, 2023). Rasio ini memberikan indikasi tentang efektivitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah secara efisien untuk mendukung kegiatan dan program pemerintah.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{(\text{Realisasi PAD})}{(\text{Potensi PAD})} \times 100\% \quad (2)$$

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi merupakan rasio yang dapat mengukur perbandingan antara jumlah pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya diterima (Puspita Geatri Br Perangin-Angin, 2023). Rasio ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik PAD dikelola untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{(\text{Realisasi Belanja Daerah})}{(\text{Realisasi Pendapatan Daerah})} \times 100\% \quad (3)$$

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dalam sebuah penelitian atau studi. Pemilihan teknik analisis data tergantung pada jenis data yang sesuai dengan penelitian ini, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang akan dijawab dengan penelitian ini. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut.

1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda menggunakan persamaan yang menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel bebas atau prediktor ($X_1, X_2, \dots, X_n$) dan satu variabel tak bebas atau respons (Y). Tujuan dari model ini adalah untuk menentukan nilai variabel tak bebas atau respons (Y) jika nilai variabel bebas atau prediktor ($X_1, X_2, \dots, X_n$) diketahui. Selain itu, tujuan lain dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui bagaimana.

Persamaan regresi linier berganda digambarkan secara matematik oleh:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 \quad (4)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan Daerah

X_1 = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

X_2 = Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X_3 = Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2) Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan pengujian dengan menggunakan Uji Asumsi Klasik. Uji Asumsi Klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Adapun jenis Uji Asumsi Klasik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji untuk mengetahui data terdistribusi normal atau tidak, sebuah data dikatakan terdistribusi normal jika nilai residualnya terstandarisasi sebagian dari nilai rata-rata yang mendekatinya. (Zahriyah, Suprianik, Parmon, & Mustofa, 2021)

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah korelasi antara satu data residual dengan data residual lainnya. (Zahriyah, Suprianik, Parmon, & Mustofa, 2021). Uji autokorelasi yang populer digunakan dalam pengujian ada atau tidaknya autokorelasi, dan menjadi salah satu alat uji untuk penelitian ini adalah dengan menggunakan Uji autokorelasi Durbin-Watson.

c) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian hubungan linier antara variabel-variabel independen dalam satu analisis regresi. (Zahriyah, Suprianik, Parmon, & Mustofa, 2021)

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji untuk mengetahui ada atau tidaknya kesamaan varian dari data residual pada model regresi berganda. (Zahriyah, Suprianik, Parmon, & Mustofa, 2021) Heteroskedastisitas adalah salah satu faktor yang menyebabkan model regresi tidak efisien atau terganggu.

3) Uji Hipotesis

a) Uji Simultan (F-test)

Uji simultan (F-test) bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (independen) secara simultan atau bersamaan terhadap variabel terikat (dependen) dengan melihat nilai signifikansi F.

b) Uji Parsial (T-test)

Uji parsial (T-test) dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen).

c) Uji Koefisien Determinasi

Uji Koefisien Determinasi menunjukkan kontribusi variabel independen dalam model regresi yang mampu menjelaskan variabel dependennya. Uji koefisien determinasi dinilai berdasarkan nilai R^2 atau R-Squared. (Binus University School of Accounting, n.d.)

4. RESULTS AND DISCUSSION

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif berfungsi sebagai lensa yang membantu dalam memahami gambaran data secara keseluruhan. Melalui analisis ini, kita dapat menguji karakteristik data dengan menggunakan ukuran seperti maksimum, minimum, mean, dan standar deviasi. Statistik Deskriptif dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Statistik Deskriptif

	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Daerah	5130735000000.00	2549432648289.942	4
Rasio Kemandirian Daerah	59.6298	21.45248	4
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	96.0085	5.41245	4
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	63.6195	37.63060	4

Rata-rata Pendapatan Daerah adalah Rp 51.307.350.000.000,00 dengan standar deviasi Rp 25.494.326.482.889,94 Rata-rata Rasio Kemandirian Daerah adalah 59,63% dengan standar deviasi 21,45 Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah 96,01% dengan standar deviasi 5,41 Rata-rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah adalah 63,62% dengan standar deviasi 37,63.

B. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-14119801856121.057	.000		.	.		
1 Rasio Kemandirian Daerah	-309227281037.212	.000	-2.602	.	.	.003	359.466
Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	254758281970.231	.000	.541	.	.	.042	23.732
Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	207966453728.979	.000	3.070	.	.	.004	249.325

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Dari hasil analisis tersebut diketahui koefisien regresinya dan berikut uraian persamaan regresinya:

$$Y = -14119801856121.057 - 309227281037.212X_1 + 254758281970.231X_2 + 207966453728.979X_3$$
 Dimana:

1. Konstantanya adalah -1.411.980.185.612,1057.
2. Koefisien Rasio Kemandirian Daerah adalah -3.092.272.810,37212, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan Rasio Kemandirian Daerah akan menurunkan Pendapatan Daerah sebesar 3.092.272.810,37212 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah 2.547.582.819,70231, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah akan meningkatkan Pendapatan Daerah sebesar 2.547.582.819,70231 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Koefisien Rasio Efektivitas Keuangan Daerah adalah 2.079.664.537,28979, yang berarti setiap kenaikan 1 satuan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah akan meningkatkan Pendapatan Daerah sebesar 2.079.664.537,28979 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

C. Uji Hipotesis

a) Uji T

Dari tabel 2 yang disajikan di atas dapat diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah (X1) mempunyai nilai sig < 0.05 (0,00 < 0,05). Maka, dapat dikatakan bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa hasil uji statistik menyatakan hipotesis pertama (H1) diterima.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2) mempunyai nilai sig < 0,05 (0,00 < 0,05). Maka, dapat dikatakan bahwa variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa hasil uji statistik menyatakan hipotesis kedua (H2) diterima.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X3) mempunyai nilai sig < 0,05 (0,00 < 0,05). Maka, dapat dikatakan bahwa variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Hal ini menjelaskan bahwa hasil uji statistik menyatakan hipotesis ketiga (H3) diterima.

b) Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1949882048449999000000000.0	3	6499606828166664000000000.000	.	. ^b
Residual	6494411836.477	0	.		
Total	19498820484500000000000000.0	3			

a. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

b. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai sig < 0,05 (0,00 < 0,05) bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah (X1), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2), dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (X3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Daerah (Y). Hal ini menjelaskan bahwa hasil uji statistik menyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima.

c) Koefisien Determinasi

Tabel 5. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000 ^a	1.000	.	.	1.684

a. Predictors: (Constant), Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Daerah

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil analisis menunjukkan nilai R Square adalah 1, yang berarti 100% variasi dari Pendapatan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Nilai R Square 1, juga mengonfirmasi bahwa 100% variasi dari Pendapatan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen.

5. CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diketahui bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
2. Diketahui bahwa variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
3. Diketahui bahwa variabel Rasio Efektivitas Keuangan Daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
4. Diketahui bahwa secara simultan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Pendapatan Daerah (Y).

Variabel Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah masing-masing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah. Selain itu, secara simultan ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Daerah (Y).

REFERENCES

- Andirfa, M. (2018). *KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH "Suatu Kajian Terkait Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Aceh."* <https://stie-lhokseumawe.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Mulya-Andirfa-KINERJA-KEUANGAN-PEMERINTAH-DAERAH-2019-2-min.pdf>
- Binus University School of Accounting. (t.thn.). Diambil kembali dari Memahami Koefisien Determinasi Dalam Regresi Linier: <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-koefisien-determinasi-dalam-regresi-linear/>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). *Akuntansi sektor publik : akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Huang, C.-J., & Ho, Y.-H. (2013). Analyzing the Fiscal Health of Local Governments in Taiwan: Evidence from Quantile Analysis. *World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering*, 7, 2068–2072. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:27064046>
- Lobao, L., & Kraybill, D. (2009). Poverty and Local Governments: Economic Development and Community Service Provision in An Era of Decentralization. *Growth and Change*, 40, 418–451. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2009.00489.x>

- McDonald, B. D. (2018). Local Governance and the Issue of Fiscal Health. *State & Local Government Review*, 50(1), 46–55. <https://www.jstor.org/stable/48596370>
- Nasirwan, N., Ginting, A. B., Manalu, C., & Sinaga, D. A. (2024). The Influence of Local Government Size and Economic Growth on Local Government Financial Performance. *Economic: Journal Economic and Business*, 3(3), 165–171. <https://doi.org/10.56495/ejeb.v3i3.698>
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. (2022). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Tangerang: Media Edu Pustaka.
- Patarai, M. I. (2022). KINERJA KEUANGAN DAERAH. De La Macca. <https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprints2.ipdn.ac.id%2F396%2F1%2FKINERJA%2520KEUANGAN%2520DAERAH.pdf&psig=AOvVaw0PMO-C9qDdCspaZxjdCzxT&ust=1710147044959000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAkQr5oM ahcKEwjY8uqqqOmEAXUAAAAAHQAAAAAQBg>
- Pollitt, C., & Bouckaert, G. (2017). *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Puspita Geatri Br Perangin-Angin, E. A. (2023). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019-2022. *Manajemen Kreatif Jurnal (MAKREJU)*, 173-183.
- Rahman, Z. (2022). Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Rasio Share dan Growth. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 233. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2472>
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Ulfa, R. F. U., & Yuliafitri, I. (2023). Analisis Rasio Keuangan Pendapatan Daerah Untuk Mengukur Kinerja Pemerintah Studi Kasus Pada Kabupaten Bandung (2017-2022). *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 2(3), 301–315.
- Zahriyah, A., Suprianik, Parmon, A., & Mustofa. (2021). *Ekonometrika*. Jember: Mandala Press.